



BPS Kabupaten Mukomuko

Laporan Keuangan **Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UAKPA** **Satker BPS Kabupaten Mukomuko** **Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022** **(AUDITED)**



BPS Kabupaten Mukomuko

Jl. Imam Bonjol, Kompleks Perkantoran Pemkab. Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu, Kota Mukomuko 38365 Telp/Fax. (0737)71633, E-mail : bps1706@bps.go.id Homepage: <http://mukomukokab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kabupaten Mukomuko adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Mukomuko mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kabupaten Mukomuko. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mukomuko, 18 April 2023

Kepala,



KHOMARUDIN, S.S.T

NIP.197512091999011001

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
Indeks Singkatan	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Neraca	1
3. Laporan Operasional	1
4. Laporan Perubahan Ekuitas	2
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kabupaten Mukomuko	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	22
B.2. Belanja	23
B.3. Belanja Pegawai	24
B.4. Belanja Barang	25
B.5. Belanja Modal	26
B.5.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27
B.5.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	28
C.1. Belanja Dibayar di Muka	28

C.2 Persediaan.....	29
C.3 Tanah.....	30
C.4 Peralatan dan Mesin	31
C.5 Gedung dan Bangunan	32
C.6 Aset Tetap Lainnya	32
C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	33
C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
C.9 Aset Tak Berwujud.....	35
C.10 Aset Lain-lain.....	35
C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	36
C.12 Utang kepada Pihak Ketiga	37
C.13 Ekuitas.....	38
D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	38
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38
D.2 Beban Pegawai.....	39
D.3 Beban Persediaan	40
D.4 Beban Barang dan Jasa	41
D.5 Beban Pemeliharaan.....	43
D.6 Beban Perjalanan Dinas	44
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	46
D.8 Kegiatan Non Operasional	47
E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	48
E.1 Ekuitas Awal	48
E.2 Surplus (Defisit) LO	48
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	48
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	49
E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.4 Transaksi Antar Entitas	49
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	50
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	50
E.5 Ekuitas Akhir.....	51
F. PENGUNGKAPAN LAINNYA	51

Daftar Tabel

Tabel 1 Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	16
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Tabel 4 Rincian Anggaran.....	20
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	22
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	23
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022	23
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	24
Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	25
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	25
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	26
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	27
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	28
Tabel 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	29
Tabel 15 Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	29
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022	34
Tabel 17 Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2022	35
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	37
Tabel 19 Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2022 dan 2021.....	37
Tabel 20 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	38
Tabel 21 Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2022	39
Tabel 22 Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	39
Tabel 23 Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2022.....	40
Tabel 24 Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	41
Tabel 25 Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	41
Tabel 26 Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2022.....	42
Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 .	44
Tabel 28 Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 ..	44
Tabel 29 Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	45
Tabel 30 Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2022.....	45
Tabel 31 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	46
Tabel 32 Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	47

Tabel 33 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	48
Tabel 34 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	49
Tabel 35 Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2022	50

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mukomuko, 18 April 2023

Kepala,



KHOMARUDIN, S.S.T

NIP.197512091999011001

Indeks Singkatan

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPS Kabupaten Mukomuko Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp41.650.019 atau mencapai 2.559,93 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.627.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.594.099.757 atau mencapai 90,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.511.447.000.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.224.977.066 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp108.415.281 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.110.763.822 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.797.963.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp120.470.753 dan Rp4.104.506.313.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.644.802, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.764.656.278 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp8.763.011.476. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp43.482.317 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp8.719.529.159.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.143.018.193 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp8.719.529.159 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp-83.533.749 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.681.017.279 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp4.020.972.564.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

BPS Kabupaten Mukomuko
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		% terhadap Anggaran	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.627.000	41.650.019	2.559,93	78.378.243
JUMLAH PENDAPATAN		1.627.000	41.650.019	2.559,93	78.378.243
Belanja Negara	B.2	9.511.447.000	8.594.099.757	90,36	4.868.912.158
Belanja Pegawai	B.3	3.125.739.000	3.087.689.570	98,78	2.745.925.858
Belanja Barang	B.4	5.818.096.000	5.440.510.187	93,51	1.658.811.300
Belanja Modal	B.5	567.612.000	65.900.000	11,61	464.175.000
JUMLAH BELANJA		9.511.447.000	8.594.099.757	90,36	4.868.912.158

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. Neraca

BPS Kabupaten Mukomuko
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	13.109.589	0
Persediaan	C.2	95.305.692	58.664.500
Jumlah Aset Lancar		108.415.281	58.664.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.588.256.000	1.588.256.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.916.828.193	1.836.027.193
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.290.323.475	2.290.323.475
Aset Tetap Lainnya	C.6	85.764.817	80.445.717
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.7	65.900.000	0
Akumulasi Penyusutan	C.8	(1.836.308.663)	(1.601.336.256)
Jumlah Aset Tetap		4.110.763.822	4.193.716.129
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	25.700.000	25.700.000
Aset Lain-lain	C.10	47.727.376	47.727.376
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.11	(67.629.413)	(60.961.766)
Jumlah Aset Lainnya		5.797.963	12.465.610
JUMLAH ASET		4.224.977.066	4.264.846.239
KEWAJIBAN			

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	120.470.753	121.828.046
JUMLAH KEWAJIBAN		120.470.753	121.828.046
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	4.104.506.313	4.143.018.193
JUMLAH EKUITAS		4.104.506.313	4.143.018.193
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.224.977.066	4.264.846.239

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. Laporan Operasional

BPS Kabupaten Mukomuko
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.644.802	1.627.244
JUMLAH PENDAPATAN		1.644.802	1.627.244
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.087.890.298	2.772.764.152
Beban Persediaan	D.3	145.518.912	95.154.168
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.964.452.537	997.887.558
Beban Pemeliharaan	D.5	156.505.747	185.445.097
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.213.691.293	336.891.007
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	196.597.491	191.307.081
JUMLAH BEBAN		8.764.656.278	4.579.449.063
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.763.011.476)	(4.577.821.819)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	8.145.100	76.750.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	10.628.337
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		37.179.217	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.842.000	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		43.482.317	66.122.662
SURPLUS/DEFISIT		(8.719.529.159)	(4.511.699.157)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

BPS Kabupaten Mukomuko
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas awal	E.1	4.143.018.193	3.844.537.592
Surplus/defisit-LO	E.2	(8.719.529.159)	(4.511.699.157)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	(83.533.749)	4.609.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	4.609.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	(83.533.749)	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	8.681.017.279	4.805.570.758
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	8.552.449.738	4.790.533.915
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	128.567.541	15.036.843
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(122.045.629)	298.480.601
Ekuitas Akhir	E.5	4.020.972.564	4.143.018.193

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas

Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022;

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;

41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
47. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Entitas dan
Rencana
Strategis

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kabupaten Mukomuko

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024,

disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi BPS :

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi

statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kabupaten Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kabupaten Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kabupaten Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kabupaten Mukomuko Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Mukomuko Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban (4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- #### Aset Lancar
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, BPS Kabupaten Mukomuko telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.627.000	1.627.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	1.627.000	1.627.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	2.784.039.000	3.125.739.000
BELANJA BARANG	3.623.185.000	5.818.096.000
BELANJA MODAL	682.280.000	567.612.000
Jumlah Belanja	7.089.504.000	9.511.447.000

Berdasarkan Program, pembagian anggaran dibagi menjadi 3 program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan (Dukman) dengan anggaran sebesar Rp4.306.781.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dengan anggaran sebesar Rp0.
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan anggaran sebesar Rp 5.204.666.000.

Selama periode tanggal 01 Januari sd 31 Desember 2022 pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko terjadi perubahan anggaran sebanyak 17 (sebelas) kali revisi DIPA. Pagu dana dalam DIPA Awal sebesar Rp 7.089.504.000 dan DIPA akhir menjadi sebesar Rp 9.511.447.000.

Penjelasan atas rincian anggaran DIPA awal dan Revisi DIPA ke 17 adalah sebagai berikut :

1. DIPA Awal Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 17 Novemer 2021 sebesar Rp **7.089.504.000** yang bersumber dari Rupiah Murni.
2. DIPA Revisi ke 01 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp **7.089.504.000**.
3. DIPA Revisi ke 02 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp **7.089.504.000**.
4. DIPA Revisi ke 03 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp **7.378.196.000**.
5. DIPA Revisi ke 04 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 11 April 2022 sebesar Rp **7.378.196.000**.
6. DIPA Revisi ke 05 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 18 April 2022 sebesar Rp **7.378.196.000**.
7. DIPA Revisi ke 06 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp **7.410.557.000**.
8. DIPA Revisi ke 07 Nomor : SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan pagu sebesar Rp **7.410.557.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-186/01000/PR.440/05/2022 tgl 31 Mei 2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja TA 2022.
9. DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan pagu sebesar Rp **7.785.777.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni.
10. DIPA Revisi ke 09 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan pagu sebesar Rp **10.027.616.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-603/02000/PR.440/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Revisi DIPA Pembukaan Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
11. DIPA Revisi ke 10 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan pagu sebesar Rp **10.027.616.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-603/02000/PR.440/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Revisi DIPA Pembukaan Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
12. DIPA Revisi ke 11 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan pagu sebesar Rp **10.027.616.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-

- 731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Revisi Anggaran dalam Rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022.
13. DIPA Revisi ke 13 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan pagu sebesar Rp **9.889.648.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-1422/02100/PR.440/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang tanggapan permohonan persetujuan revisi anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi TA 2022.
 14. DIPA Revisi ke 15 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.68533/2022 tanggal 24 November 2022 dengan pagu sebesar Rp **9.893.648.000**, mengalami kenaikan yang bersumber dari rupiah murni. Revisi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang revisi anggaran dalam rangka Realokasi Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
 15. DIPA Revisi ke 16 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp **9.511.447.000**.
 16. DIPA Revisi ke 17 Nomor : SP DIPA-054.01.2.668533/2022 tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp **9.511.447.000**.

Realisasi PNPB
Rp41.650.019

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.650.019 atau mencapai 2.559,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.627.000. Rincian Pendapatan BPS Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.627.000	9.789.902	0
Pendapatan Lain-Lain	0	31.860.117	0
Jumlah	1.627.000	41.650.019	0

Selain pendapatan dari sewa rumah dinas, pendapatan negara bukan pajak per 31 Desember 2022 ini juga dikarenakan adanya pendapatan dari lelang barang milik negara.

Selain itu terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 31.860.117,- yakni berupa pengembalian Tunjangan Struktural sebanyak 4 orang karena beralih menjadi pejabat fungsional.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022(Rp)	Realisasi 31 Desember 2021(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	9.789.902	78.378.199	(87,51)
Pendapatan Lain-Lain	31.860.117	4472.409.256,82	
Jumlah	41.650.019	78.378.243	(46,86)

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 46,86 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2021.

Penurunan realisasi pendapatan per 31 Desember 2022 ini dikarenakan tidak adanya lelang berupa mobil, akan tetapi ada pengembalian belanja tunjangan struktural sebanyak 4 orang sebagai imbas dari alih pejabat fungsional.

Realisasi Belanja Negara **B.2 Belanja Negara**
Rp8.594.099.757

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.594.099.757 atau 90,36 persen dari anggaran belanja sebesar Rp9.511.447.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.125.739.000	3.087.689.570	98,78
BELANJA BARANG	5.818.096.000	5.440.510.187	93,51

BELANJA MODAL	567.612.000	65.900.000	11,61
Jumlah Netto	9.511.447.000	8.594.099.757	90,36

Secara kumulatif realisasi belanja per 31 Desember 2022 mencapai 90,36 persen. jika melihat secara keseluruhan nilai realisasi ini tidak mencapai ekspektasi 98 persen. Hal ini dikarenakan belanja modal berupa pembangunan gedung aula kantor tidak terlaksana karena kelalaian dari kontraktor yang tidak memenuhi kontrak yang telah disetujui.

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.113.980.327	2.748.886.412	13,28
BELANJA BARANG	5.440.510.187	1.658.811.300	227,98
BELANJA MODAL	149.433.749	464.175.000	(67,81)
Jumlah Bruto	8.703.924.263	4.871.872.712	78,66
Pengembalian Belanja	109.824.506	2.960.554	3.609,59
Jumlah	8.594.099.757	4.868.912.158	76,51

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 76,51 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 76,51 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 yang dilaksanakan di Bulan Oktober.

Selain itu, juga terdapat kenaikan presentase Pengembalian Belanja sebesar 3.609,59% yang terdiri dari pengembalian uang muka kontrak pembangunan ruang pertemuan yang gagal dilaksanakan dan pengembalian belanja tunjangan struktural dari bulan Januari sampai November 2022 sebanyak 4 orang dikarenakan alih fungsi menjadi fungsional tertentu.

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp3.087.689.570

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.087.689.570 dan Rp2.745.925.858. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.626.193.298	1.439.256.754	12,99
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.487.787.029	1.309.629.658	13,60
Jumlah Bruto	3.113.980.327	2.748.886.412	13,28
Pengembalian Belanja	26.290.757	2.960.554	788,04
Jumlah	3.087.689.570	2.745.925.858	14,12

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,12 persen dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya dinamika mutasi pegawai BPS Kab. Mukomuko.
2. Pembayaran Gaji 13 dan THR Tahun 2022 juga meliputi Tunjangan Kinerja sebesar 50%.

Belanja Barang
Rp5.440.510.187

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.440.510.187 dan Rp1.658.811.300.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	292.057.050	299.245.298	(2,40)
Belanja Barang Non Operasional	3.568.064.000	569.886.350	526,10
Belanja Barang Persediaan	91.193.000	139.888.700	(34,81)

Belanja Jasa	118.999.097	127.454.848	(6,63)
Belanja Pemeliharaan	156.505.747	185.445.097	(15,61)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.213.691.293	336.891.007	260,26
Jumlah Bruto	5.440.510.187	1.658.811.300	227,98
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	5.440.510.187	1.658.811.300	227,98

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 227,98 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Secara umum, kenaikan ini disebabkan mulai diadakannya kegiatan besar yang dilaksanakan pada tahun 2022 yakni Pendataan Awal Regsosek 2022, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang kegiatannya masih dibatasi karena pandemi Covid-19.

Belanja Barang Pendataan Awal Regsosek 2022 dilakukan mulai awal triwulan III Tahun 2022 yakni pada bulan September dengan anggaran yang sangat besar, sehingga hal ini meningkatkan persentase belanja barang.

*Belanja Modal
Rp65.900.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.900.000 dan Rp464.175.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	464.175.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.433.749	0	0,00
Jumlah Bruto	149.433.749	464.175.000	(67,81)
Pengembalian Belanja	83.533.749	0	0,00
Jumlah	65.900.000	464.175.000	(49,81)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2022 sebesar 85,80 persen dibandingkan 31 Desember 2021 disebabkan oleh

tidak adanya belanja modal berupa alat dan mesin, tetapi berupa pengembalian uang jaminan dari aula kantor BPS Kabupaten Mukomuko yang tidak terlaksana di Tahun 2022.

B.5.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp464.175.000.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	464.175.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	464.175.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	464.175.000	(100,00)

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2022, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp464.175.000.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya belanja peralatan dan mesin di Tahun 2022.

B.5.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp65.900.000.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022(Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.433.749	0	0,00
Jumlah Bruto	149.433.749	0	0,00
Pengembalian Belanja	-83.533.749	0	0,00
Jumlah	65.900.000	0	0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

Pada tahun 2022 ini direncanakan terdapat pembangunan gedung kantor berupa aula pertemuan. Per Januari Tahun 2022 ini telah dilakukan perencanaan perluasan bangunan gedung kantor permanen. Proses perencanaan sudah selesai dan sudah dibayarkan 80% dari kontrak sebesar Rp. 59.600.000,-. Akan tetapi, pada proses konstruksi pembangunan tidak berjalan lancar padahal uang muka sudah dibayarkan ke pihak penyedia. Pada bulan Desember 2022 pihak BPS memutuskan kontrak dengan pihak penyedia karena tidak adanya progress pekerjaan konstruksi sampai dengan 7 Desember 2022 yang seharusnya progress sudah diatas 90%. Pada tanggal 31 Desember 2022 jaminan uang muka sudah dikembalikan dan sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp.83.533.749,-.

Akan tetapi, uang yang sudah dibayarkan kepada pihak perencana sebesar Rp.59.600.000 dan honor pokja sebesar Rp.6.300.000,- tidak bisa dikembalikan.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar di Muka **C.1 Belanja Dibayar di Muka**

Rp13.109.589

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.109.589 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021(Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	13.109.589	0
Jumlah	13.109.589	0

Belanja dibayar dimuka yang dilakukan adalah penggunaan sewa gudang yang ditujukan untuk penyimpanan dokumen hasil pendataan awal Regsosek 2022 dan dokumen yang akan digunakan pada kegiatan Sensus Pertanian 2023. Kontrak sewa gudang dilakukan dengan Nilai kontrak secara keseluruhan adalah sebesar Rp 15.000.000 yang dimulai pada 16 November 2022 dan berakhir pada 15 November 2023. Pemanfaatan yang sudah dipakai per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.890.411 sehingga sisa manfaat dari kontrak sebesar Rp 13.109.589 yang sudah dibayar pada tahun 2022 akan digunakan pada tahun 2023.

Persediaan
Rp95.305.692

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp95.305.692 dan Rp58.664.500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	95.305.692	58.664.500
Jumlah	95.305.692	58.664.500

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan	
Per 31 Desember	58.664.500
2021	
Mutasi Tambah :	
Pembelian	91.193.000
Transfer Masuk	92.809.104
Hasil Opname Fisik	4.829.100
Total Mutasi Tambah	188.831.204
:	
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	(150.348.012)
Rusak	(1.842.000)
Total Mutasi Kurang :	(152.190.012)
Kenaikan(Penurunan)	36.641.192
Saldo Nilai Perolehan	
Per 31 Desember	95.305.692
2022	

Terdapat Transfer Masuk sebesar Rp.92.809.104,- berupa perlengkapan Sensus Pertanian (ST), kalender 2023, dan dokumen Survei dari seluruh fungsi di BPS Kabupaten Mukomuko.

Selain itu, opname fisik berupa spanduk ST, Leaflet ST, kuesioner Regsosek yang rusak, serta poster ST. Nilai kuesioner Regsosek yang rusak senilai Rp.1.842.000,- sehingga mengurangi nilai persediaan.

Selain itu juga, terdapat pembelian persediaan sebesar Rp.91.193.000,- yakni berupa pembelian ATK dan computer supplies.

Tanah
Rp1.588.256.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.588.256.000 dan Rp1.588.256.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per	1.588.256.000
31 Desember 2021	
Mutasi Tambah :	

Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	<u>0</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.588.256.000

Rincian aset tanah BPS Kab. Mukomuko per 31 Desember 2022 adalah Tanah Gedung Bangunan Kantor BPS Kabupaten Mukomuko dan Tanah Bangunan Rumah Negara yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kompleks Pemda Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu Kota Mukomuko, seluas 5.000 m² dengan nilai sebesar Rp. 1.588.256.000 dan sudah bersertifikat hak pakai dengan nomer sertifikat 00113 Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2015.

Peralatan dan Mesin

C.4 Peralatan dan Mesin

Rp1.916.828.193

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.916.828.193 dan Rp1.836.027.193. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	1.836.027.193
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	<u>80.801.000</u>
Total Mutasi Tambah :	80.801.000
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>80.801.000</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.916.828.193
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	(1.544.222.851)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	372.605.342

Terdapat transfer masuk senilai Rp.80.801.000,- yakni berupa:

1. Alat pengukur kadar air 2 buah senilai Rp.17.100.000,-
2. Alat Penampi 1 buah senilai Rp.1.702.500,-
3. PC unit 5 buah senilai Rp.41.623.500,-
4. Printer 1 buah senilai Rp.20.375.000,-

*Gedung dan
Bangunan*

Rp2.290.323.475

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.290.323.475 dan Rp2.290.323.475. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan	
Per 31 Desember	2.290.323.475
2021	
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Masuk	266.241.000
Total Mutasi Tambah	266.241.000
:	
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Keluar	(266.241.000)
Total Mutasi Kurang :	(266.241.000)
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan	2.290.323.475
31 Desember 2022	
Akumulasi	
Penyusutan sampai	
dengan 31 Desember	(292.085.812)
2022	
Nilai Buku sampai	
dengan 31 Desember	1.998.237.663
2022	

Terdapat reklasifikasi nilai rumah dinas dari tipe A menjadi tipe C, yakni rumah dinas yang ditempati kepala BPS Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.266.241.000,-.

Aset Tetap
Lainnya
Rp85.764.817

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp85.764.817 dan Rp80.445.717. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	80.445.717
Mutasi Tambah :	
Perolehan Lainnya	5.319.100
Total Mutasi Tambah :	5.319.100
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	5.319.100
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	85.764.817
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	85.764.817

Terdapat mutasi tambah aset lainnya berupa buku dan publikasi senilai Rp.5.319.100,- dari BPS Provinsi Bengkulu dan BPS Kabupaten Mukomuko.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp65.900.000

C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.900.000 dan Rp0.

Terdapat nilai KDP sebesar Rp.65.900.000,- yang terdiri dari Rp.59.600.000 berupa pembayaran kepada penyedia perencanaan dan honor pokja senilai Rp.6.300.000,-.

Pada tahun 2022 ini direncanakan terdapat pembangunan gedung kantor berupa aula pertemuan. Per Januari Tahun 2022 ini telah dilakukan perencanaan perluasan bangunan gedung kantor permanen. Proses perencanaan sudah selesai dan sudah dibayarkan 80% dari kontrak sebesar Rp. 59.600.000,-. Akan tetapi, pada proses konstruksi pembangunan tidak berjalan lancar padahal uang muka sudah dibayarkan ke pihak penyedia. Pada bulan Desember 2022 pihak BPS memutuskan kontrak dengan pihak penyedia karena tidak adanya progress pekerjaan konstruksi sampai dengan 7 Desember 2022 yang seharusnya progress sudah diatas 90%. Pada tanggal 31 Desember 2022 jaminan uang muka sudah dikembalikan dan sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp.83.533.749,-.

Akan tetapi, uang yang sudah dibayarkan kepada pihak perencana sebesar Rp.59.600.000 dan honor pokja sebesar Rp.6.300.000,- tidak bisa dikembalikan.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.836.308.663*

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp1.836.308.663 dan Rp1.601.336.256. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.916.828.193	1.544.222.851	372.605.342
Gedung dan Bangunan	2.290.323.475	292.085.812	1.998.237.663
Aset Tetap Lainnya	85.764.817	0	85.764.817
Jumlah	4.292.916.485	1.836.308.663	2.456.607.822

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Nilai penyusutan aset secara otomatis didapatkan dari aplikasi.

Aset Tak
Berwujud
Rp25.700.000

C.9 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp25.700.000 dan Rp25.700.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
Jumlah	25.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	25.700.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	25.700.000
Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022	(22.487.500)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	3.212.500

Tidak terdapat penambahan serta pengurangan nilai aset tak berwujud lainnya BPS Kabupaten Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2022.

Aset Lain-lain
Rp47.727.376

C.10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp47.727.376 dan Rp47.727.376. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	47.727.376
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	47.727.376
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	(45.141.913)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	2.585.463

Nilai buku aset lain-lain sampai 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.706.787,- berupa ATB (Aset Tak Berwujud) terdiri dari software.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp67.629.413

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp67.629.413 dan Rp60.961.766. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	25.700.000	22.487.500	3.212.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	47.727.376	45.141.913	2.585.463
Jumlah	73.427.376	67.629.413	5.797.963

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penyusutan untuk aset lainnya yaitu penyusutan dan amortisasi untuk *software* dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp120.470.753

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp120.470.753 dan Rp121.828.046. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kabupaten Mukomuko per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2022 dan 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	115.710.834	115.510.106
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.759.919	6.317.940
Jumlah	120.470.753	121.828.046

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 terdiri dari

1. Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 sebesar Rp.115.710.834,-
2. Tagihan Listrik Bulan Desember Rp.3.524.426,-
3. Tagihan Internet Bulan Desember Rp.773.950,-
4. Tagihan Telepon Bulan Desember Rp.461.543,-

Ekuitas
Rp4.104.506.313

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.104.506.313 dan Rp4.143.018.193. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp1.644.802

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.644.802 dan Rp1.627.244. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.644.802	1.627.200	1,08
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44	(100,00)
Jumlah	1.644.802	1.627.244	1,08

Kenaikan persentase realisasi PNBP ini dikarenakan adanya pendapatan dari sewa rumah dinas kepala BPS Kabupaten Mukomuko.

Tabel 21
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2022

tabel

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.644.802	1.644.802	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Jumlah	1.644.802	1.644.802	0

Tidak ada selisih antara nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai 31 Desember 2022.

Beban Pegawai
Rp3.087.890.298

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.087.890.298 dan Rp2.772.764.152. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 22
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	1.023.971.484	997.893.999	2,61
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.433	19.021	(24,12)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58.121.302	50.807.670	14,39
Beban Tunj. Anak PNS	19.454.266	18.894.092	2,96
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	58.320.000	(56,79)
Beban Tunj. Fungsional PNS	203.340.000	51.660.000	293,61
Beban Tunj. PPh PNS	3.145.500	233.595	1.246,56
Beban Tunj. Beras PNS	60.398.280	57.211.800	5,57
Beban Uang Makan PNS	186.528.000	176.397.000	5,74
Beban Tunjangan Umum PNS	18.905.000	21.759.542	(13,12)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.488.812.033	1.339.567.433	11,14
Jumlah	3.087.890.298	2.772.764.152	11,37

Meningkatnya Beban Pegawai diakibatkan oleh penambahan jumlah pegawai di BPS Kabupaten Mukomuko. Hal ini membuat mayoritas rincian beban pegawai naik cukup tinggi jika dibandingkan Desember 2021. Selain itu, pada Juli 2021 telah dilakukan pengangkatan jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama sehingga ini membuat Tunjangan Fungsional umum turun dan menaikkan nilai Tunjangan Khusus. Selain itu, terdapat penurunan persentase penurunan 56,79 persen karena peraturan baru terkait delayering pejabat struktural sehingga eselon IV dialihkan menjadi fungsional. Hal ini sejalan dengan kenaikan tunjangan fungsional khusus sebesar 293,61 persen.

Tabel 23

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	1.023.971.484	1.024.795.760	(824.276)
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.433	14.433	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58.121.302	58.121.302	0
Beban Tunj. Anak PNS	19.454.266	19.454.266	0
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	203.340.000	203.340.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	3.145.500	3.145.500	0
Beban Tunj. Beras PNS	60.398.280	60.398.280	0
Beban Uang Makan PNS	186.528.000	186.528.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	18.905.000	18.905.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.488.812.033	1.487.787.029	1.025.004
Jumlah	3.087.890.298	3.087.689.570	200.728

Terdapat perbedaan nilai LO dan LRA antara beban gaji pokok PNS dan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) dikarenakan perbedaan sistem pencatatan dimana LRA dicatat berdasarkan basis akrual dan LO dicatat berdasarkan basis kas.

*Beban Persediaan
Rp145.518.912*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp145.518.912 dan Rp95.154.168. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 52,93% yang disebabkan oleh tambahan kegiatan diluar rutinan yakni SPLF pada bulan Juni dan Pendataan awal regsosek 2022. barang persediaan tersebut berupa ATK petugas, perlengkapan lapangan petugas, dan computer supplies.

Tabel 24

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	145.518.912	95.154.168	52,93
Jumlah	145.518.912	95.154.168	52,93

Beban Barang dan Jasa

D.4 Beban Barang dan Jasa

Rp3.964.452.537

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.964.452.537 dan Rp997.887.558. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 25

Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	195.676.000	208.572.298	(6,18)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	268.000	2.905.000	(90,77)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	96.120.000	87.768.000	9,52
Beban Bahan	469.276.000	85.489.350	448,93

Beban Honor Output Kegiatan	3.046.663.000	460.323.000	561,85
Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.630.000	0	0,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40.495.000	24.074.000	68,21
Beban Langganan Listrik	63.865.964	52.872.288	20,79
Beban Langganan Telepon	5.531.290	5.516.160	0,27
Beban Langganan Air	372.464	317.000	17,50
Beban Sewa	1.890.411	0	0,00
Beban Jasa Profesi	4.000.000	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	28.664.408	37.479.462	(23,52)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	32.571.000	(100,00)
Jumlah	3.964.452.537	997.887.558	297,28

Presentase Beban Barang dan Jasa pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 297,28% disebabkan oleh kenaikan presentase pos beban bahan dan honor output kegiatan yakni masing-masing sebesar 448,93% dan 561,85%. Hal ini disebabkan oleh tambahan kegiatan diluar rutinan yakni kegiatan SP Long Form dan Pendataan Awal Regsosek 2022.

Tabel 26
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	195.676.000	195.669.050	6.950
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	268.000	268.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	96.120.000	96.120.000	0
Beban Bahan	469.276.000	469.276.000	0

Beban Honor Output Kegiatan	3.046.663.000	3.046.663.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.630.000	11.630.000	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40.495.000	40.495.000	0
Beban Langganan Listrik	63.865.964	65.435.048	(1.569.084)
Beban Langganan Telepon	5.531.290	5.527.177	4.113
Beban Langganan Air	372.464	372.464	0
Beban Sewa	1.890.411	15.000.000	(13.109.589)
Beban Jasa Profesi	4.000.000	4.000.000	0
Beban Jasa Lainnya	28.664.408	28.664.408	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Jumlah	3.964.452.537	3.979.120.147	(14.667.610)

Terdapat perbedaan nilai LO dan LRA antara beban barang dan jasa dikarenakan perbedaan sistem pencatatan dimana LRA dicatat berdasarkan basis akrual dan LO dicatat berdasarkan basis kas.

Pada tahun 2022 ini terdapat sewa gudang untuk dokumen hasil lapangan kegiatan pendataan awal Regsosek 2022 dan persiapan dokumen Sensus Pertanian senilai Rp15.000.000,- per tanggal 16 November 2022 gudang telah digunakan sehingga terdapat selisih nilai antara LO dan LRA senilai Rp13.109.589,- yang merupakan nilai sewa pada tahun 2023 (1 Januari - 15 November).

*Beban
Pemeliharaan
Rp156.505.747*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp156.505.747 dan Rp185.445.097. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.930.000	56.866.700	22,97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.575.747	128.578.397	(32,67)
Jumlah	156.505.747	185.445.097	(15,61)

Pada akhir tahun 2022 terdapat pemeliharaan bangunan kantor yakni berupa pengecatan bangunan serta gerbang, renovasi lapangan voli, dan renovasi jalan masuk sehingga ini membuat pos Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 22,97% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

Tabel 28
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.930.000	69.930.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.575.747	86.575.747	0
Jumlah	156.505.747	156.505.747	0

Beban pemeliharaan senilai Rp0 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Tidak ada selisih antara nilai LO dan LRA pada beban pemeliharaan sampai 31 Desember 2022 hal ini dikarenakan semua belanja pemeliharaan yang dicatat pada tahun 2022 telah direalisasikan pada tahun 2022 sehingga tidak terdapat nilai selisih antara nilai LO dan LRA.

Beban
Perjalanan Dinas
Rp1.213.691.293

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.213.691.293 dan Rp336.891.007. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 29
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	145.460.406	58.406.007	149,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.360.000	15.735.000	207,34
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.004.627.000	262.750.000	282,35
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.243.887	0	0,00
Jumlah	1.213.691.293	336.891.007	260,26

Kenaikan beban perjalanan dinas mencapai 260,26 persen disebabkan karena melandainya kasus COVID-19 sehingga diperbolehkan kembali untuk melakukan perjalanan dinas dan melakukan rapat secara tatap muka.

Tabel 30
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	145.460.406	145.460.406	0
Beban Perjalanan	48.360.000	48.360.000	0

Dinas Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.004.627.000	1.004.627.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.243.887	15.243.887	0
Jumlah	1.213.691.293	1.213.691.293	0

Beban Pegawai yang tercatat berdasarkan nilai LO dan LRA tidak mengalami perbedaan . Biasanya Adanya selisih antara nilai LO dan LRA merupakan perbedaan yang dikarenakan sistem pencatatan dengan basis akrual dan basis kas.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp196.597.491*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp196.597.491 dan Rp191.307.081. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tabel 31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	134.684.166	129.515.079	3,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.245.678	55.245.678	0,00
Beban Amortisasi Software	6.425.000	6.425.000	0,00

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	242.647	121.324	100,00
Jumlah	196.597.491	191.307.081	2,77

Beban Penyusutan otomatis terhitung dari aplikasi dengan melihat masa manfaat dan nilai barang. Beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar 2,77 persen dibandingkan 31 Desember 2022 dikarenakan masa manfaat yang berkurang sehingga menambah nilai beban penyusutan.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp43.482.317

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.145.100	76.750.999	(89,39)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	10.628.337	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	31.860.117	0	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	5.319.100	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang	1.842.000	0	0,00
Jumlah	43.482.317	66.122.662	(34,24)

Kegiatan non operasional per 31 Desember 2022 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan 31 Desember 2021 karena tidak adanya lelang mobil, namun hanya lelang laptop dan perangkat lainnya.

Sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp.31.860.117,- yang merupakan pengembalian belanja tunjangan struktural Tahun 2022 (Januari-November) karena kebijakan pengalihan jabatan dari struktural ke fungsional tertentu.

Selain itu, juga terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang senilai Rp.1.842.000,- yang merupakan kuesioner pendataan awal regsosek 2022 yang dinyatakan rusak.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.143.018.193

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.143.018.193 dan Rp3.844.537.592.

Defisit LO
Rp8.719.529.159

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.719.529.159 dan Rp4.511.699.157. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar minus Rp0 dan Rp4.609.000. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021(Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	4.609.000
Jumlah	0	4.609.000

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar 0.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.609.000.

Sampai 31 Desember 2022 tidak ada koreksi atas reklasifikasi pada aset di BPS Kabupaten Mukomuko.

Transaksi Antar Entitas Rp8.681.017.279

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.681.017.279 dan Rp4.805.570.758. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 34
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.594.099.757	4.868.912.158
Diterima dari Entitas Lain	(41.650.019)	(78.378.243)
Transfer Masuk	128.567.541	15.036.843
Jumlah	8.681.017.279	4.805.570.758

Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) tahun 2022 naik tajam bila dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya kegiatan di luar rutinan seperti Sensus Penduduk Long Form 2022 (SPLF 2022) dan pendataan awal regsosek tahun 2022. diterima dari entitas lain (DDEL) tahun 2022 turun cukup tajam bila dibandingkan tahun 2021 karena tidak adanya lelang berupa mobil seperti halnya di tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terdapat lelang berupa laptop, dan aset BMN lainnya. Sedangkan untuk transfer masuk dari BPS Provinsi Bengkulu dan BPS RI berupa buku, publikasi, kuesioner, dan BMN lainnya.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar minus Rp41.650.019 sedangkan DKEL sebesar Rp8.594.099.757.

Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) sebesar Rp8.594.099.757,- merupakan realisasi belanja DIPA sampai dengan 31 Desember 2022. diterima dari entitas lain (DDEL) sebesar minus Rp41.650.019,- merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pengembalian belanja per 31 Desember 2022.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp128.567.541. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Tabel 35

Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2022

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
Jumlah		0	0	0

Transfer masuk berupa

1. Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)
2. Alat Penampi
3. P.C Unit
4. Printer (Peralatan Personal Komputer)

Ekuitas Akhir
Rp4.020.972.564

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.020.972.564 dan Rp4.143.018.193.

Keadaan Kas pada akhir Bulan Desember 2022

1. Uang Tunai di Brankas	Rp. 0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp. 0,00
3. Jumlah Kas	Rp. 0,00

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 001/1706/KPA/2023 tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 002/1706/KPA/2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran: Khomarudin, SST

Pejabat Pembuat Komitmen : Andi Butsiawan Sukoco, S.Si

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Christiana Erida, S.Si

Bendahara Pengeluaran : Mustakim, A.Md

Bendahara Penerimaan : Sapta Apriyenti, S.P